



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I NYOMAN GIRI PRASTA
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 39714

II. DATA HARTA

- | | | |
|--|------------|----------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 4.005.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA BADUNG, WARISAN Rp. 420.000.000 | | |
| 2. Tanah Seluas 134 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000 | | |
| 3. Tanah dan Bangunan Seluas 666 m2/666 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 3.225.000.000 |
| 1. MOBIL, TOYOTA PICK-UP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000 | | |
| 2. MOBIL, TOYOTA LAINDCRUISER PRADO MOBIL PENUMPANG Tahun 2011, HIBAH TANPA AKTA Rp. 40.000.000 | | |
| 3. MOBIL, HYUNDAI PALISADE Tahun 2023, LAINNYA Rp. 865.000.000 | | |
| 4. MOBIL, TOYOTA 86 2. OL A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 685.000.000 | | |
| 5. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS-001 Tahun 2024, HADIAH Rp. 1.600.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 197.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 143.500.292 |



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 7.570.500.292

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.570.500.292

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.